

**ETIKA POLITIK MELAYU: INTEGRITAS ADAT, ISLAM,  
DAN DINAMIKA MODERN ( STUDI KONTEKSTUAL  
MASYARAKAT DESA TULUNG SELAPAN )**

***MALAY POLITICAL ETHICS: INTEGRITY OF TRADITION,  
ISLAM, AND MODERN DYNAMICS (CONTEXTUAL STUDY OF  
THE TULUNG SELAN VILLAGE COMMUNITY)***

**Reykal Arya Assalafani<sup>1</sup>, Muchlis Minako<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: [reykalaryakan@gmail.com](mailto:reykalaryakan@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: [Muchlisminako@gmail.ac.id](mailto:Muchlisminako@gmail.ac.id)

**Abstrak**

Etika politik Melayu merupakan sistem nilai yang terbentuk dari integrasi antara adat dan ajaran Islam yang menempatkan moralitas sebagai dasar dalam praktik kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep etika politik Melayu, transformasinya dalam konteks modern, serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat lokal dengan fokus pada Desa Tulung Selapan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan analisis deskriptif-kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kesopanan (adab), musyawarah, dan amanah masih bertahan dalam praktik sosial masyarakat, namun mengalami pergeseran akibat modernisasi dan pragmatisme politik. Artikel ini menegaskan bahwa etika politik Melayu tetap relevan, tetapi memerlukan reinterpretasi agar selaras dengan prinsip demokrasi modern seperti transparansi dan akuntabilitas

**Kata kunci:** etika politik, Melayu, Islam, budaya politik, Tulung Selapan

***Abstract***

*Malay political ethics is a value system formed from the integration of customs and Islamic teachings which places morality as the basis for the practice of power. This article aims to critically analyze the concept of Malay political ethics, its transformation in the modern context, and its relevance in the lives of local communities with a focus on Tulung Selapan Village. The research method uses a qualitative approach through literature study with descriptive-critical analysis. The results of the study show that values such as politeness (adab), deliberation and trust still persist in society's social practices, but are experiencing shifts due to modernization and political pragmatism. This article emphasizes that Malay political ethics remains relevant, but requires reinterpretation to align with modern democratic principles such as transparency and accountability.*

**Keywords:** political ethics, Malay, Islam, political culture, Tulung Selapan

**PENDAHULUAN**

Etika politik merupakan dimensi normatif yang memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan secara bermoral dalam suatu

masyarakat. Dalam perspektif ini, politik tidak hanya dipahami sebagai proses perebutan dan distribusi kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang etis yang menuntut tanggung jawab, integritas, dan orientasi pada kepentingan publik. Tanpa adanya landasan etika, praktik politik cenderung terjebak dalam pragmatisme yang mengabaikan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Suseno, 1999).

Dalam masyarakat Melayu, etika politik memiliki karakteristik yang khas karena terbentuk dari integrasi antara adat dan ajaran Islam. Nilai-nilai politik tidak berdiri secara sekuler, melainkan berakar pada norma budaya dan religius yang hidup dalam masyarakat. Prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah mencerminkan bahwa adat memperoleh legitimasi dari ajaran Islam sebagai sumber moral utama (Effendy, 2004). Dengan demikian, etika politik Melayu tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki dimensi spiritual. Kekuasaan dalam perspektif ini dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan (Azra, 2013).

Nilai-nilai utama dalam etika politik Melayu meliputi kesopanan (adab), musyawarah, dan amanah. Kesopanan menjadi dasar dalam interaksi politik yang menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka. Dalam praktiknya, kritik terhadap kekuasaan sering disampaikan secara halus dan tidak konfrontatif. Musyawarah mencerminkan pendekatan kolektif dalam pengambilan keputusan, di mana kepentingan bersama menjadi prioritas utama. Sementara itu, amanah menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan. Namun, perkembangan sistem politik modern telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik etika politik tersebut. Modernisasi dan demokratisasi memperkenalkan sistem politik yang lebih rasional, prosedural, dan berbasis institusi. Dalam sistem ini, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh nilai moral, tetapi juga oleh mekanisme formal seperti pemilihan umum dan hukum positif. Perubahan ini menciptakan ketegangan antara nilai tradisional yang bersifat normatif dengan praktik politik modern yang cenderung pragmatis.

Kondisi tersebut terlihat dari berbagai fenomena politik kontemporer seperti korupsi, politik uang, dan patronase yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai etika dalam praktik kekuasaan. Nilai amanah yang seharusnya menjadi dasar dalam kepemimpinan sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan nilai budaya dan agama tidak secara otomatis menjamin praktik politik yang etis tanpa didukung oleh sistem institusional yang kuat. Selain itu, nilai kesopanan dalam etika politik Melayu juga memiliki implikasi yang kompleks dalam konteks demokrasi modern. Di satu sisi, kesopanan berfungsi menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik yang destruktif. Namun, di sisi lain, budaya kesopanan dapat membatasi ruang kritik terhadap kekuasaan.

Prinsip musyawarah juga menghadapi tantangan dalam sistem politik modern yang lebih menekankan mekanisme voting. Dalam demokrasi prosedural, keputusan politik sering kali ditentukan oleh suara mayoritas tanpa mempertimbangkan kualitas deliberasi. Akibatnya, musyawarah yang dalam tradisi Melayu memiliki makna substantif mengalami reduksi menjadi formalitas. Dalam konteks lokal, masyarakat Desa Tulung Selapan memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana etika politik Melayu masih hidup dalam praktik sosial. Nilai-nilai seperti musyawarah, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, dan kegiatan keagamaan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat (Fauzi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa etika politik Melayu tidak hanya bertahan sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang nyata.

Namun demikian, masyarakat Tulung Selapan juga tidak terlepas dari pengaruh modernisasi. Perubahan sistem pemerintahan, dinamika politik nasional, serta perkembangan ekonomi telah memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat berada dalam posisi transisional antara mempertahankan nilai tradisional dan menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa etika politik Melayu merupakan sistem nilai yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis etika politik Melayu serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern, khususnya di Desa Tulung Selapan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki beberapa makna sejenis, seperti inkuri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis, fenomenologis, studi kasus, interpretatif ekologis dan deskriptif (Moleong, 2007). Namun pada dasarnya penggunaan istilah ini adalah memiliki makna yang sama yaitu menekankan pada kealamian sumber data. Selain itu penelitian kualitatif dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan landasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, sebagai lawannya eksperimen. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis, data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Etika Politik Melayu dalam Perspektif Tradisi dan Islam**

Etika politik Melayu pada dasarnya merupakan hasil konstruksi historis yang menggabungkan nilai adat dan ajaran Islam sebagai landasan moral dalam kehidupan kekuasaan. Dalam tradisi Melayu, kekuasaan tidak dipahami sebagai hak absolut, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari kekuatan formal, tetapi juga dari pengakuan moral masyarakat. Nilai kesopanan (adab) menjadi fondasi utama dalam etika politik Melayu. Kesopanan tidak hanya berkaitan dengan tata krama individu, tetapi juga menjadi mekanisme sosial dalam mengelola konflik dan menjaga stabilitas. Dalam praktiknya, komunikasi politik dilakukan secara simbolik dan tidak konfrontatif.

Namun, dalam perspektif kritis, nilai kesopanan ini memiliki implikasi ambivalen. Di satu sisi, kesopanan menjaga keteraturan sosial dan menghindari konflik yang destruktif. Di sisi lain, kesopanan dapat menjadi penghambat bagi berkembangnya budaya kritik yang diperlukan dalam sistem demokrasi modern.

Kritik yang disampaikan secara implisit sering kali tidak efektif dalam mengontrol kekuasaan, sehingga membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selain kesopanan, prinsip musyawarah juga menjadi elemen penting dalam etika politik Melayu. Musyawarah mencerminkan pendekatan kolektif dalam pengambilan keputusan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Dalam konteks ini, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai proses moral yang menekankan dialog, pertimbangan, dan konsensus. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya kualitas diskusi dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik politik modern, musyawarah sering mengalami reduksi menjadi formalitas. Dominasi sistem voting dalam demokrasi prosedural telah menggeser makna musyawarah dari proses deliberatif menjadi sekadar prosedur administratif.

Di samping itu, konsep amanah menjadi inti dari etika politik Melayu. Dalam perspektif Islam klasik, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi, kekuasaan merupakan tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan keadilan dan integritas. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan religius. Meskipun demikian, dalam realitas politik kontemporer, nilai amanah sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif dan praktik empiris dalam kehidupan politik modern.

### **Etika Politik dalam Praktik Sosial Masyarakat Desa Tulung Selapan**

Masyarakat Desa Tulung Selapan merupakan representasi dari komunitas Melayu yang masih mempertahankan nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial. Secara historis, wilayah ini berkembang dari sistem marga yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan sosial dan politik masyarakat. Dalam praktik sosial, nilai

musyawarah masih menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Pertemuan masyarakat, forum keagamaan, serta interaksi informal menjadi ruang deliberasi yang mencerminkan keberlanjutan etika politik Melayu. Keputusan yang diambil dalam forum tersebut umumnya mempertimbangkan kepentingan kolektif, sehingga mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, penghormatan terhadap tokoh masyarakat juga menjadi bagian penting dari etika politik lokal. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai penjaga norma dan etika dalam kehidupan masyarakat. Namun, modernisasi telah membawa perubahan dalam praktik tersebut. Sistem pemerintahan formal yang berbasis birokrasi serta pengaruh politik nasional telah memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi pedoman utama mulai berhadapan dengan realitas politik yang lebih kompleks dan pragmatis.

### **Transformasi dan Tantangan Etika Politik Melayu**

Transformasi dari sistem tradisional ke sistem modern telah membawa dampak signifikan terhadap etika politik Melayu. Pada masa tradisional, etika politik sangat bergantung pada norma adat dan moralitas individu pemimpin. Namun, dalam sistem modern, politik lebih bersifat institusional dan prosedural. Perubahan ini menciptakan ketegangan antara nilai tradisional dan praktik modern. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan feodalisme yang masih menempatkan pemimpin sebagai figur yang tidak mudah dikritik. Kondisi ini menghambat berkembangnya budaya partisipasi dan kontrol publik terhadap kekuasaan.

Selain itu, penggunaan nilai adat dan agama sebagai legitimasi politik juga menjadi persoalan tersendiri. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai tersebut digunakan secara simbolik untuk memperoleh dukungan masyarakat tanpa diikuti oleh implementasi yang nyata. Hal ini menunjukkan adanya instrumentalisasi nilai budaya dalam praktik politik. Tantangan lainnya adalah lemahnya internalisasi nilai etika dalam sistem politik modern. Meskipun nilai-nilai seperti amanah dan

kejujuran masih diakui secara normatif, dalam praktiknya nilai tersebut sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa etika politik tidak cukup hanya sebagai norma budaya, tetapi juga harus didukung oleh sistem institusional yang kuat.

#### Relevansi Etika Politik Melayu dalam Konteks Politik Kontemporer

Di tengah berbagai tantangan tersebut, etika politik Melayu tetap memiliki relevansi sebagai dasar moral dalam kehidupan politik. Nilai-nilai seperti amanah, musyawarah, dan kesopanan dapat menjadi alternatif terhadap praktik politik modern yang cenderung pragmatis dan transaksional. Namun, relevansi ini bergantung pada kemampuan untuk mereinterpretasi nilai tradisional agar sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Nilai kesopanan, misalnya, perlu dipahami tidak sebagai pembatas kritik, tetapi sebagai etika dalam menyampaikan kritik secara konstruktif.

Demikian pula, musyawarah perlu dikembangkan sebagai proses deliberatif yang substantif, bukan sekadar formalitas. Integrasi antara nilai tradisional dan sistem modern menjadi kunci dalam membangun politik yang etis dan demokratis. Dengan demikian, etika politik Melayu tidak hanya relevan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas politik kontemporer.

#### **Etika Politik Melayu dalam Krisis Moral Politik Kontemporer Indonesia**

Dalam konteks politik Indonesia kontemporer, etika politik mengalami tantangan yang cukup serius, terutama terkait dengan melemahnya integritas dan moralitas dalam praktik kekuasaan. Fenomena seperti korupsi, politik uang, serta penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan praktik empiris dalam kehidupan politik.

Jika dikaitkan dengan etika politik Melayu, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan keadilan belum sepenuhnya menjadi landasan dalam praktik politik modern. Padahal, dalam tradisi Melayu, kekuasaan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral dan religius. Ketika nilai ini tidak lagi menjadi dasar dalam praktik politik, maka legitimasi kekuasaan akan mengalami penurunan, terutama di mata masyarakat. Lebih jauh, penelitian terbaru

juga menunjukkan bahwa rendahnya moralitas politik berpengaruh langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hal ini terlihat dari meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap lembaga legislatif pasca pemilu, yang disebabkan oleh berbagai pelanggaran etik dan praktik politik yang tidak transparan (Noho, 2025). Dengan demikian, krisis etika politik tidak hanya berdampak pada individu pemimpin, tetapi juga pada stabilitas sistem politik secara keseluruhan.

### **Etika Politik Melayu dalam Era Digital dan Media Sosial**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan ruang baru dalam praktik politik, yang dikenal sebagai ruang digital. Dalam konteks ini, etika politik Melayu menghadapi tantangan baru yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Media sosial telah menjadi arena utama dalam komunikasi politik, namun sering kali diwarnai oleh disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa etika komunikasi politik di era digital masih lemah, terutama dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan (Suhendar, 2026). Dalam perspektif etika politik Melayu, kondisi ini bertentangan dengan nilai kesopanan (adab) yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam komunikasi. Selain itu, prinsip tabayyun (klarifikasi) dalam tradisi Islam juga relevan dalam menghadapi fenomena penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial.

Namun, di sisi lain, ruang digital juga memberikan peluang untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat. Etika politik Melayu dapat direinterpretasi dalam konteks digital dengan menekankan nilai kesantunan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam komunikasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa etika politik tidak bersifat statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

### **Integrasi Etika Politik Melayu dengan Nilai Pancasila**

Etika politik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai moral seperti keadilan, kemanusiaan, dan

demokrasi yang sejalan dengan prinsip etika politik Melayu. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara nilai Pancasila dan realitas politik di Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku politik, yang ditandai oleh maraknya korupsi, konflik politik, dan penyalahgunaan kekuasaan (Benu, 2025).

Nilai ketuhanan dalam Pancasila, misalnya, memiliki keselarasan dengan prinsip dasar dalam etika politik Melayu yang menempatkan agama sebagai sumber legitimasi moral. Prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah menunjukkan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam praktik politik, harus berlandaskan pada nilai-nilai religius. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila yang menekankan pentingnya moralitas berbasis ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, integrasi ini dapat memperkuat dimensi spiritual dalam etika politik yang sering kali terabaikan dalam praktik politik modern yang cenderung sekuler dan pragmatis.

Selanjutnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep kesopanan (adab) dalam tradisi Melayu. Kesopanan tidak hanya berkaitan dengan tata krama, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks politik, nilai ini menuntut adanya komunikasi yang etis, penghormatan terhadap perbedaan, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya, nilai ini sering kali terabaikan, terutama dalam dinamika politik yang diwarnai oleh polarisasi dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, integrasi etika politik Melayu dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun budaya politik yang lebih beradab dan inklusif.

Nilai persatuan dalam Pancasila juga memiliki relevansi dengan orientasi harmoni sosial dalam etika politik Melayu. Dalam tradisi Melayu, menjaga keharmonisan merupakan tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik sebisa mungkin dihindari karena dianggap dapat merusak tatanan sosial. Namun, dalam perspektif kritis, orientasi terhadap harmoni ini perlu diimbangi dengan keterbukaan terhadap perbedaan dan konflik yang konstruktif. Dalam konteks demokrasi, konflik tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat menjadi sarana untuk

memperjuangkan kepentingan publik secara lebih adil. Oleh karena itu, integrasi nilai persatuan dengan etika politik Melayu perlu diarahkan pada penciptaan harmoni yang dinamis, bukan harmoni semu yang menutupi permasalahan yang ada. Lebih lanjut, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memiliki kesesuaian langsung dengan prinsip musyawarah dalam tradisi Melayu. Musyawarah dalam etika politik Melayu bukan sekadar mekanisme formal, tetapi merupakan proses deliberatif yang mengedepankan pertimbangan moral dan kepentingan bersama. Dalam praktik modern, nilai ini sering kali tereduksi oleh dominasi sistem voting yang lebih menekankan kuantitas suara daripada kualitas diskusi. Oleh karena itu, integrasi antara konsep musyawarah Melayu dan prinsip demokrasi dalam Pancasila dapat memperkuat praktik demokrasi deliberatif yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan.

Sementara itu, nilai keadilan sosial dalam Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan konsep amanah dalam etika politik Melayu. Amanah menuntut pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam mengelola kekuasaan. Namun, dalam realitas politik kontemporer, nilai keadilan sering kali terdistorsi oleh kepentingan elit dan praktik politik transaksional. Oleh karena itu, integrasi nilai amanah dengan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Secara kritis, meskipun terdapat kesesuaian antara etika politik Melayu dan nilai Pancasila, implementasi integrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan simbolisasi nilai tanpa implementasi yang nyata. Nilai-nilai etika sering kali hanya digunakan sebagai retorika politik tanpa diikuti oleh tindakan yang konkret. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai tidak cukup dilakukan pada level wacana, tetapi juga harus diwujudkan dalam sistem kelembagaan dan praktik politik sehari-hari. Selain itu, pluralitas masyarakat Indonesia juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses integrasi ini. Etika politik Melayu sebagai nilai lokal harus dapat beradaptasi

dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, integrasi dengan Pancasila sebagai nilai nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diterima secara luas tanpa menghilangkan karakter lokalnya. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai titik temu antara berbagai nilai budaya yang ada di Indonesia, termasuk etika politik Melayu.

Dengan demikian, integrasi etika politik Melayu dengan nilai Pancasila bukan hanya merupakan upaya konseptual, tetapi juga merupakan strategi praktik dalam membangun sistem politik yang beretika. Integrasi ini menegaskan bahwa nilai lokal dan nilai nasional dapat saling memperkuat dalam menciptakan politik yang lebih bermoral, demokratis, dan berkeadilan. Keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik sehari-hari.

### **Rekonstruksi Etika Politik Melayu dalam Konteks Modern**

Konstruksi etika politik Melayu dalam konteks modern merupakan proses dinamis yang melibatkan adaptasi, reinterpretasi, dan transformasi nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dalam sistem politik kontemporer. Dalam hal ini, etika politik Melayu tidak dapat dipahami sebagai sistem nilai yang statis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan struktur politik, ekonomi, dan budaya. Proses konstruksi ini menjadi penting karena nilai-nilai tradisional yang tidak mengalami pembaruan berisiko kehilangan relevansi di tengah dinamika politik modern yang semakin kompleks dan rasional.

Dalam konteks modern, sistem politik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada legitimasi moral berbasis adat dan agama, tetapi juga pada legitimasi prosedural yang dihasilkan melalui mekanisme formal seperti pemilihan umum, sistem hukum, dan birokrasi. Oleh karena itu, konstruksi etika politik Melayu perlu mengakomodasi dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi normatif (nilai moral) dan dimensi institusional (aturan formal). Integrasi kedua dimensi ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem politik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermoral secara substantif.

Salah satu aspek penting dalam konstruksi ini adalah reinterpretasi terhadap nilai kesopanan (adab). Dalam tradisi Melayu, kesopanan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka. Namun, dalam konteks demokrasi modern, nilai kesopanan perlu dikembangkan agar tidak menghambat kebebasan berpendapat dan kritik terhadap kekuasaan. Kesopanan harus dipahami sebagai etika dalam menyampaikan kritik secara konstruktif, bukan sebagai alasan untuk membungkam perbedaan pendapat. Dengan demikian, konstruksi baru terhadap kesopanan dapat menciptakan ruang publik yang tetap beradab namun tetap kritis dan demokratis.

Selain itu, prinsip musyawarah juga memerlukan rekonstruksi agar sesuai dengan tuntutan demokrasi modern. Dalam tradisi Melayu, musyawarah menekankan konsensus sebagai tujuan utama. Namun, dalam sistem politik kontemporer, konsensus tidak selalu dapat dicapai karena adanya keberagaman kepentingan dan pandangan. Oleh karena itu, musyawarah perlu dikembangkan sebagai proses deliberatif yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada kualitas diskusi. Pendekatan ini memungkinkan adanya perbedaan pendapat tanpa menghilangkan semangat kolektivitas yang menjadi ciri khas etika politik Melayu.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan konsep amanah dalam konteks institusional. Dalam tradisi Melayu, amanah dipahami sebagai tanggung jawab moral individu pemimpin. Namun, dalam sistem modern, konsep ini perlu diperluas menjadi tanggung jawab kolektif yang didukung oleh mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan kata lain, amanah tidak hanya bergantung pada integritas individu, tetapi juga pada sistem yang mampu mencegah dan mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi etika politik Melayu dalam konteks modern harus melibatkan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai etika.

Lebih lanjut, konstruksi etika politik Melayu juga perlu mempertimbangkan pengaruh globalisasi yang membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memahami politik. Nilai-nilai individualisme, rasionalitas, dan efisiensi yang berkembang dalam sistem global sering kali bertentangan dengan nilai kolektivitas dan harmoni dalam tradisi Melayu. Oleh karena itu, diperlukan upaya selektif dalam mengadopsi nilai-nilai global agar tidak menghilangkan identitas lokal. Dalam konteks ini, etika politik Melayu dapat berfungsi sebagai filter normatif yang memastikan bahwa perubahan yang terjadi tetap sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat.

Dalam era digital, konstruksi etika politik Melayu juga menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan perubahan pola komunikasi politik. Media sosial telah menjadi ruang utama dalam interaksi politik, namun sering kali diwarnai oleh ujaran kebencian, disinformasi, dan polarisasi. Oleh karena itu, nilai kesopanan (adab) perlu diterjemahkan ke dalam etika komunikasi digital yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi etika politik Melayu harus mampu menjangkau ruang-ruang baru dalam kehidupan sosial, termasuk ruang digital yang semakin dominan. Selain itu, konstruksi etika politik Melayu juga perlu memperhatikan dimensi pendidikan politik sebagai sarana internalisasi nilai. Tanpa adanya proses pendidikan yang sistematis, nilai-nilai etika akan sulit diimplementasikan dalam praktik politik. Pendidikan politik berbasis nilai lokal dapat menjadi strategi untuk membangun kesadaran etika di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti amanah, musyawarah, dan keadilan dapat ditanamkan sebagai bagian dari budaya politik yang berkelanjutan. Secara kritis, konstruksi etika politik Melayu dalam konteks modern tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural seperti korupsi, patronase, dan lemahnya penegakan hukum. Tantangan ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tidak cukup jika tidak diikuti oleh reformasi sistem politik secara menyeluruh. Oleh karena itu, konstruksi etika politik Melayu harus dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, konstruksi etika politik Melayu dalam konteks modern merupakan proses transformasi yang bertujuan untuk menjadikan nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam menghadapi dinamika politik kontemporer. Proses ini tidak hanya melibatkan pelestarian nilai, tetapi juga reinterpretasi dan integrasi dengan sistem modern. Jika dilakukan secara konsisten, konstruksi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sistem politik yang lebih etis, demokratis, dan berkeadilan

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika politik Melayu merupakan sistem nilai yang terbentuk dari integrasi antara adat dan ajaran Islam yang menempatkan moralitas sebagai fondasi utama dalam praktik kekuasaan. Nilai-nilai seperti kesopanan (adab), musyawarah, dan amanah tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai prinsip etis yang mengatur hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak dipahami sebagai hak absolut, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara adil, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam perspektif kritis, etika politik Melayu memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu sebagai mekanisme menjaga stabilitas sosial dan sebagai instrumen moral dalam mengontrol kekuasaan. Nilai kesopanan, misalnya, berperan penting dalam menciptakan harmoni sosial, namun di sisi lain dapat membatasi ruang kritik terhadap kekuasaan jika tidak diinterpretasikan secara tepat. Demikian pula, prinsip musyawarah yang idealnya menjadi sarana deliberasi kolektif, dalam praktik modern sering mengalami reduksi menjadi formalitas akibat dominasi sistem politik yang prosedural. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dengan praktik politik modern yang lebih rasional dan pragmatis.

Dalam konteks masyarakat Desa Tulung Selapan, etika politik Melayu masih memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam kehidupan sosial. Praktik musyawarah, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, serta peran agama dalam

kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa nilai-nilai etika politik Melayu masih diinternalisasi oleh masyarakat. Namun, modernisasi dan dinamika politik nasional telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola pikir dan praktik politik masyarakat. Nilai-nilai tradisional mulai berhadapan dengan realitas politik yang lebih kompleks, sehingga terjadi proses adaptasi dan transformasi dalam etika politik lokal. Lebih lanjut, tantangan utama etika politik Melayu dalam konteks kontemporer terletak pada melemahnya internalisasi nilai moral dalam praktik politik. Fenomena seperti politik transaksional, patronase, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik menunjukkan bahwa nilai-nilai etika belum sepenuhnya menjadi landasan dalam sistem politik modern. Dalam kondisi ini, etika politik Melayu sering kali hanya berada pada level simbolik tanpa implementasi yang nyata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (2001). *Imagined communities*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Kencana.
- Benu, A., dkk. (2025). Kesenjangan nilai Pancasila dengan realitas etika politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, T. (2004). *Tunjuk ajar Melayu*. Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Fauzi, M. (2020). *Konsep politik Melayu dalam perspektif budaya lokal*. ResearchGate.
- Geertz, C. (2016). *Abangan, santri, dan priyayi dalam masyarakat Jawa*. Komunitas Bambu.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam*. LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
- Noho, F. (2025). Moralitas politik dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di Indonesia pasca Pemilu 2024. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*.
- Nurmaulid, A., dkk. (2026). Dekadensi demokrasi dan etika politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern*. Serambi.
- Sejarah Tulung Selapan. (2023). ResearchGate.
- Suhendar, A., dkk. (2026). Polarisasi politik dalam era media sosial. *Jurnal Moralita*, 7(1).
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan*. Kencana.